

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor perekonomian Korea Selatan merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan. Korea Selatan sendiri sempat menjadi salah satu negara termiskin di dunia pasca perang dingin, hingga pada era modern Korea Selatan berhasil memutar balikkan keadaan dan muncul sebagai salah satu negara berpengaruh dalam dunia perekonomian internasional yang bahkan sampai menduduki posisi keempat diantara negara – negara dunia. Perkembangan pesat yang dicapai oleh Korea Selatan tentunya tidak hanya terjadi berkat faktor internal saja, dengan kata lain terdapat faktor – faktor eksternal yang juga membantu mendorong terjadinya ledakan pada sektor perekonomian Korea Selatan ini. Terjadi perubahan fokus oleh Korea Selatan dalam sektor perekonomiannya yang menjadi lebih *export-oriented* dimana hal ini menjadikan aktivitas ekspor dan impor menjadi fokus utama bagi Korea Selatan. Setelah melalui beberapa dekade dengan perkembangan tersebut, Korea Selatan berhasil menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang sangat berkembang diantara negara – negara dunia.

Tentunya dengan mindset *export-oriented*, Korea Selatan menjalin kerjasama dan relasi dengan berbagai negara di seluruh dunia dimana salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan sendiri telah lama berlangsung sejak tahun 1973, dimana pada saat itu hubungan

diplomasi antara Indonesia dan Korea Selatan berawal. Namun hubungan pada tingkat konsulat telah dilakukan sejak tahun 1966, sehingga sejak tahun 1966 lah hubungan antar Indonesia dan Korea Selatan bermula.¹ Setelah melalui beberapa dekade, kualitas hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan selalu meningkat secara baik pada berbagai bidang seperti bidang investasi, perekonomian, pendidikan dan juga kebudayaan. Kedua negara terus berupaya untuk meningkatkan hubungan bilateral mereka dengan melakukan berbagai macam kegiatan seperti cultural exchanges antar kedua negara, pertukaran pelajar, partisipasi Indonesia dalam event – event budaya di Korea Selatan dan masih banyak lagi. Dapat terlihat bahwa pada sektor pendidikan dan sosial budaya, hubungan kedua negara sangat amat baik.

Pada sektor politik dan diplomasi, Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerjasama yang meliputi tentang anti-korupsi, kejahatan transnasional dan juga memerangi teroris. Ditambah lagi dengan kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang yang tentunya akan semakin mempererat hubungan baik yang telah tercipta antar Indonesia dan Korea Selatan. Korea Selatan sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan negara – negara di ASEAN melalui ASEAN-Korean Free Trade Agreement atau AKFTA yang juga memberikan dampak yang cukup positif bagi kedua negara. Eratnya hubungan antar kedua negara ini memunculkan kesadaran bahwa kedua negara dapat meraih keuntungan melalui kerjasama bilateral yang lebih komprehensif di bidang

¹ “Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Republik Korea.” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020. https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu. Diakses pada 8 Maret 2020

perekonomian yang pada akhirnya berujung kepada pembentukan kerjasama IK-CEPA.

Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau lebih dikenal dengan IK-CEPA sendiri merupakan kerjasama ekonomi yang terjadi antar Indonesia dan Korea Selatan. Lebih spesifiknya, IK-CEPA merupakan sebuah kerjasama yang bersifat lebih rinci dan komprehensif antar kedua negara yang mencakup bidang perdagangan, investasi, jasa, dan kerjasama ekonomi.² Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan sektor perdagangan dan kerjasama ekonomi kedua negara.

Kerjasama ini memiliki 3 pilar utama, yaitu akses perdagangan pasar yang diperluas, fasilitasi terhadap investasi, dan juga kerjasama dalam peningkatan kapasitas.³ Kerjasama IK-CEPA ini ditujukan untuk mengoptimalkan sektor perekonomian kedua negara agar dapat sama-sama berkembang dan juga menjadi lebih kompetitif di dunia global. Selain itu kerjasama ini juga merupakan bentuk upaya dari kedua negara untuk meningkatkan kembali aktivitas perdagangan dari kedua negara yang sempat menurun setelah berjalannya kerjasama Working Level Task Force Meeting (WLTFM) yang pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 16.43% dari angka USD 12.91 Milyar menjadi USD 24.762,59 Juta dan begitu juga tahun-tahun berikutnya.⁴ Oleh karenanya kedua negara bersikeras

² Ismail, A., & Mulyaman, D. M. (2018). Pendekatan Behavioralisme dan Kendala Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(2), 33

³ Indonesia R, R. P. (2019). Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan, 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1), 1906-1920.

⁴ Siliviana W, Belita Ayu. "Penurunan Perdagangan Bilateral Indonesia-Korea Selatan Dalam Kerjasama Working Level Taskforce Meeting (WLTFM)." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 4 (2017): 1381-96.

untuk menciptakan kerjasama ekonomi secara komprehensif yang dapat kembali meningkatkan aktivitas perekonomian dan sekaligus mengembangkan sektor perekonomian mereka, yang pada akhirnya memunculkan konsep kerjasama IK-CEPA ini.

Poin penting yang terdapat pada kerjasama ini adalah pengurangan dan penghilangan tarif antar kedua negara. Korea Selatan akan menghapuskan 97.3% pos tarif pada perdagangan impor barang dan 95.54% pos tarif pada perdagangan jasa, sedangkan Indonesia akan menghapuskan 94% pos tarif pada perdagangan impor barang dan 92.06% pada perdagangan jasa. Selain itu juga Indonesia akan memfasilitasi investasi Korea Selatan untuk 0.96% dari pos tarif.⁵ Hal tersebut tentunya merupakan hal yang positif bagi kedua negara karena aktivitas perdagangan antar kedua negara akan meningkat seiring berjalannya waktu. Tercatat sejak tahun 2015 hingga pada tahun 2019 terdapat peningkatan tren perdagangan sebesar 2.5% oleh kedua negara. Jumlah perdagangan Indonesia dan Korea Selatan per tahun 2019 sendiri mencapai angka USD 15,65 Milyar.⁶ Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2018, diharapkan dengan adanya kerjasama ini angka tersebut akan mengalami peningkatan seiring berjalannya kerjasama tersebut. Selain itu juga komoditas – komoditas yang memiliki *high demand* dari kedua negara seperti minyak bumi, batu bara, dan bijih tembaga dari

⁵ Dgitn. (2020, December 18). Direktorat Jenderal. Retrieved from <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesiakorea-cepa-tonggak-baru-hubungan-ekonomi-bilateral-kedua-negara>

⁶ Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia. (2020, December 18). Indonesia–Korea CEPA: Tonggak baru hubungan Ekonomi bilateral KEDUA Negara - Ministry of TRADE Republic of Indonesia. Retrieved from <https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/indonesia-korea-cepa-tonggak-baru-hubungan-ekonomi-bilateral-kedua-negara>

Indonesia dan karet sintetis, papan elektronik atau memori, kain tenun sintetis akan menjadi lebih mudah untuk masuk ke masing – masing negara.

Angka investasi Korea Selatan di Indonesia juga cukup tinggi melihat Korea Selatan adalah salah satu negara dengan jumlah investasi terbanyak di Indonesia. Dengan berbagai macam projek yang sudah ada seperti *Hyundai Motors* dan juga proyeksi dari kerjasama IK-CEPA ini, maka jumlah investasi yang diberikan oleh Korea Selatan ke Indonesia juga akan bertambah. Peningkatan ini diprediksikan akan datang pada beberapa tahun kedepan melihat relasi dan aktivitas perekonomian antar kedua negara ini. Namun, peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia ini diprediksi dapat terjadi lebih cepat terutama dengan terjalannya kerjasama melalui IK-CEPA ini. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi Korea Selatan untuk semakin meningkatkan sektor perekonomiannya dan juga membuka kesempatan untuk investasi dua arah bagi kedua negara.

Meskipun dipenuhi dengan hal positif dan juga perkembangan yang sangat menguntungkan bagi keduanya, proses negosiasi ini sempat terhenti pada tahun 2014 akibat dari tidak ditemukannya titik terang yang oleh kedua negara dan juga tidak ada rencana dari kedua negara untuk melanjutkan proses tersebut dalam waktu yang dekat. Tentunya terdapat perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak diberhentikannya negosiasi dari IK-CEPA ini baik itu perubahan kondisi dunia internasional, perubahan tata pemerintahan dan juga pemimpin dari kedua negara dan sebagainya. Perubahan ini pada akhirnya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dari Korea

Selatan itu sendiri. Pada akhirnya, Korea Selatan memutuskan untuk kembali melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA ini. Tentunya terdapat beberapa adaptasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk kembali melanjutkan proses negosiasi. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis ingin membahas lebih lanjut terkait dengan rasionalitas dari Korea Selatan untuk kembali melanjutkan proses negosiasi tersebut. Penulis merasa tertarik untuk membahas apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Korea Selatan untuk kembali melanjutkan proses negosiasi kerjasama IK-CEPA ini hingga pada akhirnya secara resmi ditandatangani pada tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Mengapa Korea Selatan memilih untuk kembali melanjutkan proses negosiasi kerjasama *Indonesia-Korea Comprehensive economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui rasionalitas Korea Selatan dalam keputusan untuk melanjutkan proses negosiasi kerjasama *Indonesia-Korea Comprehensive economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) yang sempat terhenti pada tahun 2014 silam.

2. Mengetahui lebih lanjut hubungan tentang hubungan perekonomian antara Korea Selatan dengan Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap peneliti – peneliti selanjutnya sekaligus juga untuk dapat menjadi tolak ukur dan banding terhadap penelitian – penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bentuk sumbangan ilmu pengetahuan terhadap jurusan dan kajian Ilmu Hubungan Internasional melalui konsep berkaitan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *Adaptive Model of Foreign Policy* James N. Rosenau. Penggunaan konsep tersebut bertujuan untuk menggali dan mencari tahu lebih dalam tentang kerjasama IK-CEPA, terutama berkaitan dengan konteks rasionalitas Korea Selatan dalam perlanjutan proses negosiasinya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi diri penulis sendiri. Dengan melakukan penelitian ini, penulis merasa bahwa penulis akan secara otomatis menjadi lebih paham mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan juga terutama Korea Selatan, khususnya dalam

bidang kerjasama ekonomi. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan wawasan terhadap pembaca terkait dengan topik kerjasama ekonomi IK-CEPA dan juga rasionalitas dari berlanjutnya negosiasi kerjasama tersebut.

1.4 Penelitian Terdahulu

Tentunya penelitian ini tidak dapat terlepas dari penelitian terdahulunya. Oleh karena itu, penulis memaparkan penelitian – penelitian yang menjadi rujukan dan referensi bagi penulis dalam proses penulisan penelitian ini. Penelitian – penelitian ini diambil dari jurnal, buku, skripsi, thesis, berita, & tulisan – tulisan ilmiah yang bersifat baik fisik (buku) dan juga non-fisik (digital) yang membahas topik yang berkaitan dengan topik pembahasan yang telah ditentukan oleh penulis pada penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut penulis kategorikan menjadi 3 yakni faktor pembentuk IK-CEPA, analisis kerjasama perekonomian Indonesia-Korea Selatan, dan analisis politik luar negeri Korea Selatan melalui Model Adaptif James N. Rosenau.

1.4.1 Faktor Pembentuk IK-CEPA

Penelitian Pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Achmad Ismail dan Darynaufal Mulyaman pada tahun 2018 yang berjudul **Pendekatan Behaviorisme dan Kendala Perundingan Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).**⁷

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan konsep behaviorisme yang menjelaskan tentang IK-CEPA

⁷ Ismail, A., & Mulyaman, D. M. (2018). Pendekatan Behaviorisme dan Kendala Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(2), 33.

dan kendala dalam proses perundingannya menggunakan pendekatan tersebut.

Penulis menyatakan bahwa pada dasarnya kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang cukup baik dan bisa dibilang minim konflik, Indonesia memiliki komoditas ekspor utama kepada Korea Selatan adalah mayoritasnya bahan migas (minyak, batubara, dan gas) sedangkan komoditas non-migas utama seperti kopi, coklat, karet, tekstil, dan sebagainya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan hubungan yang dimiliki oleh Indonesia dan Korea Selatan, kerjasama ini harusnya dapat segera mencapai kesepakatan bersama dan ditandatangani. Namun nyatanya setelah proses negosiasi yang berjalan selama 2 tahun, negosiasi kerjasama ini mencapai pemberhentian yang seketika. Tentu hal tersebut menunjukkan adanya bentrok kepentingan dan kendala – kendala yang muncul ketika negosiasi kerjasama ini berjalan.

Meskipun tidak bersifat permanen, namun pemberhentian ini tidak terlihat dapat diselesaikan dalam waktu dekat yang diperjelas dengan pernyataan dari Menteri Perdagangan RI Muhammad Luthfi pada tahun 2014. Memang setelahnya tidak ada negosiasi lanjutan dari kedua negara setelah pemberhentian yang terbilang tiba – tiba tersebut. Menurut Menteri Perdagangan RI sendiri, negosiasi ini gagal akibat dari

tidak tercapainya kesepakatan terkait dengan hal garansi investasi dari Korea Selatan kepada Indonesia sendiri, dan juga ditambah dengan bentuk proteksionisme Korea Selatan di sektor pertaniannya. Namun Menteri Perdagangan RI menyatakan bahwa adanya kemungkinan negosiasi kerjasama ini akan tercapai ketika terjadi pergantian pemerintahan terutama pada kegiatan pemilu Indonesia tahun 2014.⁸

Penelitian ini memiliki perbedaan terkait dengan pendekatan fokus dari penelitiannya. Pada penelitian ini berfokus kepada pendekatan behavioralisme yang mempengaruhi kerjasama IK-CEPA dan juga kendala yang dapat muncul melalui kerjasama tersebut. Sementara penelitian penulis lebih berfokus kepada proses negosiasi IK-CEPA pasca pemberhentian negosiasinya dan juga mengapa Korea Selatan beranggapan bahwa melanjutkan proses negosiasi tersebut merupakan keputusan rasional. Kemudian persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait dengan kerjasama IK-CEPA.

Penelitian kedua adalah skripsi dari Ayu Caesar Tiara yang berjudul **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terhentinya Perundingan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) di Tahun 2014** yang ditulis pada tahun 2017.⁹

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang

⁸ Ibid.

⁹ Tiara, A. C. (2017). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terhentinya Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement (IK-CEPA) Di Tahun 2014* (Universitas Katolik Parahyangan, 2017) (pp. 91-93). Bandung: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP.

menggunakan konsep kepentingan nasional dan juga paradigma realisme. Dengan menggunakan konsep tersebut penulis berupaya untuk menjelaskan dan mengelaborasi faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya pemberhentian perundingan IK-CEPA pada tahun 2014.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pertama adalah faktor ekonomi yang merupakan bagian dari perdagangan barang dan kepentingan investasi dimana tidak terdapatnya persetujuan mengenai pos tarif kepada bidang – bidang yang terbilang sebagai bidang yang penting untuk dinegosiasikan dalam kerjasama ini seperti otomotif, pertanian, baja, perikanan, dan lain – lain. Perundingan terhadap sektor – sektor tersebut dinilai tidak dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi kedua negara yang kemudian menyebabkan munculnya keraguan bagi kedua negara. Selain itu juga terdapat faktor lain bahwa tidak tercapainya kepentingan nasional dalam bidang investasi dimana Korea Selatan menolak klausul investasi yang diajukan oleh Indonesia yang ingin menjadikan kerjasama IK-CEPA ini sebagai sebuah win-win solution bagi kedua negara, sehingga dengan penolakan tersebut menyebabkan tidak adanya ditemukan titik terang pada negosiasi ini. Dan yang terakhir adalah nilai ekspor yang tidak seimbang dimana Korea Selatan meminta total nilai ekspor sebanyak USD 734 Juta dan Indonesia meminta USD 149.38 Juta.¹⁰ Hal tersebut

¹⁰ Ibid.

menjadi pemikiran bagi Indonesia karena Indonesia mendapatkan nilai impor yang lebih banyak dibanding dengan nilai ekspor, sehingga hal tersebut tidak selaras dengan kepentingan nasional Indonesia yang ingin mengubah perekonomian Indonesia menjadi sistem yang tidak lagi bergantung pada impor namun berubah menjadi *export-driven economy*.

Berdasarkan penelitian ini terdapat kesamaan yang sama-sama membahas tentang kerjasama IK-CEPA dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama tersebut. Akan tetapi perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terdapat pada fokus penelitian. Penelitian Ayu Caesar ini lebih berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi terhentinya proses negosiasi kerjasama IK-CEPA pada tahun 2014. Sedangkan penelitian penulis lebih condong kepada faktor-faktor yang menjadi rasionalitas dari Korea Selatan yang membuat mereka bersedia untuk melanjutkan proses negosiasi yang terhenti tahun 2014 tadi.

Penelitian ketiga merupakan skripsi yang berjudul **Kerjasama Republik Indonesia dengan Republik Korea: Penyelesaian Perundingan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Tahun 2011-2014*** yang ditulis oleh Vindy Fellisia pada tahun 2017.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian tipe deskriptif yang menggunakan konsep kerjasama internasional dan

¹¹ Fellisia, V. (2017). *Kerjasama Republik Indonesia Dengan Republik Korea: Studi Kasus Penyelesaian Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Tahun 2011-2014* (Universitas Padjajaran, 2017). Jatinangor: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP.

negosiasi sebagai landasan bagi penulis dalam upayanya untuk menjelaskan dan meneliti tentang IK-CEPA ini.

Korea Selatan juga tentunya meningkatkan aktivitas kerjasama ekonominya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah partner kerjasama ekonomi yang telah terjalin dengannya. ASEAN, Chile, Australia, dan Selandia Baru merupakan beberapa diantaranya. Selain itu Korea Selatan juga memiliki kerjasama Korea-Central America *Free Trade Agreement* atau KCAFTA yang dilakukannya bersama dengan negara – negara di Amerika Tengah dan juga sedang melakukan perundingan antara *Korea, China, Japan Free Trade Agreement* dengan RCEP.

Selain itu Korea Selatan juga sedang bernegosiasi dengan Indonesia mengenai kerjasama perekonomiannya. Kedua negara memang sudah memiliki kerjasama melalui ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* atau AKFTA yang dimana Korea Selatan bekerjasama dengan negara – negara anggota ASEAN. Namun kedua negara menginginkan sesuatu yang lebih komprekensif dan bersifat spesial lebih dari kerjasama AKFTA tadi. Sehingga muncullah konsep kerjasama Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* dimana perjanjian yang lebih bersifat bilateral antara Indonesia dan Korea saja dan juga diharapkan sebagai bentuk *upgrade* dari perjanjian AKFTA tadi. Perjanjian tersebut juga ditargetkan dapat memberikan keuntungan yang banyak bagi kedua negara dan melihat hubungan baik yang telah berjalan selama beberapa dekade antara Indonesia dan Korea

Selatan, negosiasi kerjasama ini diproyeksikan akan ditandatangani akan berjalan dalam waktu yang dekat.¹²

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk sekarang kerjasama IK-CEPA ini masih berada dalam tahap negosiasi dan tawar menawar dalam proses pencapaian kesepakatan. Baik Indonesia maupun Korea Selatan masih belum menemukan titik terang terhadap kerjasama perdagangan dan investasi yang dimana bentuk kerjasama tersebut merupakan poin terpenting dalam negosiasi dan kerjasama IK-CEPA itu sendiri.

Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yang sama-sama membahas tentang proses negosiasi kerjasama IK-CEPA. Akan tetapi perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terdapat pada batas waktu dan juga fokus penelitian. Penelitian Vindy ini memiliki fokus pada proses penyelesaian proses negosiasi IK-CEPA yang memiliki batasan waktu dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pemberlanjutan proses negosiasi IK-CEPA pasca pemberhentian negosiasinya pada tahun 2014 yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2020, dan juga memiliki batasan waktu yang lebih lama yaitu hingga tahun 2021.

Ketiga penelitian diatas bermanfaat bagi penulis untuk memahami baik itu proses pembentukan kerjasama IK-CEPA ini dan juga bagaimana proses negosiasi IK-CEPA ini terhenti. Selain itu juga

¹² Ibid.

penelitian ini berguna untuk menjadi referensi bagi penulis untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.4.2 Analisis Kerjasama Perekonomian Indonesia-Korea Selatan

Penelitian keempat adalah jurnal yang berjudul **Analysis of Trade in Goods between Indonesia and South Korea on Cooperation Forum IKCEPA** yang ditulis oleh Ragimun Abdullah pada tahun 2016.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan analisis keseimbangan sederhana sebagai metode analisa datanya. Dengan begitu penulis berusaha menjelaskan tentang IK-CEPA dan kegiatan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan didalam penelitian ini. Penulis pertama menjelaskan tentang *ASEAN-Korean Free Trade Agreement* atau AKFTA yang dimana merupakan sebuah kerjasama ekonomi antara negara – negara di ASEAN dengan Korea Selatan. Penulis menyatakan bahwa dengan adanya AKFTA ini, terdapat peningkatan kegiatan ekspor sebanyak 8.19% dan juga pada kegiatan impor sebanyak 21.36%.¹⁴ sehingga menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama AKFTA ini sangat bermanfaat dan memberikan keuntungan yang baik bagi Indonesia.

Kemudian penulis menyodorkan data – data terhadap beberapa barang yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dinegosiasikan dengan Korea Selatan dan juga kerjasama IK-CEPA. Hal – hal tersebut

¹³ Abdullah, R. (2017). Analysis of Trade in Goods between Indonesia and South Korea on Cooperation Forum IKCEPA. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 8(6(J)), 171-182.

¹⁴ Ibid.

salah satunya merupakan bubuk susu yang merupakan barang yang memiliki angka ekspor ke dunia lumayan tinggi, kemudian terdapat juga kura – kura air tawar dimana permintaan dari Korea Selatan sangat tinggi namun hanya tercatat sebanyak 10% pasokan yang datang dari Indonesia. Dan masih banyak lagi hal yang dinilai dapat dinegosiasikan terkait dengan IK-CEPA.

Pada penelitian ini persamaan terlihat pada fokus pembahasan yang sama-sama membahas tentang kerjasama IK-CEPA. Kemudian perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian ini fokus penelitian lebih mengarah kepada analisis terhadap komoditas yang dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari kerjasama IK-CEPA. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus kepada pertimbangan dari Korea Selatan untuk kembali mereaktivasi proses negosiasi kerjasama IK-CEPA tersebut.

Penelitian kelima merupakan jurnal berjudul **Penurunan Perdagangan Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Kerjasama Working Level Taskforce Meeting (WLTFM)** yang ditulis oleh Belita Ayu Silviana Wibisono yang ditulis pada tahun 2016.¹⁵ Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian eksplanatif yang menggunakan konsep kerjasama dan regim internasional yang dapat membantu penulis untuk

¹⁵ Silviana W, Belita Ayu. “Penurunan Perdagangan Bilateral Indonesia-Korea Selatan Dalam Kerjasama Working Level Taskforce Meeting (WLTFM).” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 4 (2017): 1381–96.

menjelaskan apa yang menjadi latar belakang menurunnya perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan ini setelah proyek WLTFM.

Penulis menjelaskan tentang *Working Level Task Force Meeting* atau WLTFM yang merupakan bagian dari kerjasama strategis *Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* yang resmi berlaku pada akhir tahun 2006 dimana kerjasama ini merupakan sebuah kerjasama yang memiliki 3 pilar utama, yaitu: kerjasama keamanan dan politik dengan tujuan untuk menciptakan kestabilan di Asia, kerjasama kebudayaan sosial dengan tujuan untuk lebih mempromosikan daya tarik dari kebudayaan dan kelebihan pada sektor pariwisata masing – masing negara, dan juga kerjasama ekonomi, yang di dalamnya berfokus kepada sektor investasi dan perdagangan.

Menurut penulis, Korea Selatan bersifat *egoistic* dan *self-centered* dimana komoditas utama impor mereka dari Indonesia bersifat migas. Pada saat itu juga Korea Selatan mempromosikan kepentingan mereka yaitu energi alternatif yang jika berhasil tentunya tidak akan lagi memerlukan impor komoditi dari Indonesia. Kemudian juga nilai exportir yang terlalu tinggi juga menyebabkan para eksportir untuk menjadi keberatan dalam melakukan kegiatan ekspor.¹⁶

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terlihat pada fokus penelitian. Penelitian oleh Belita Ayu ini berfokus kepada kerjasama

¹⁶ Ibid.

yang dijalin antara Indonesia dan Korea Selatan yaitu WLFTM yang pada akhirnya berujung pada pembentukan kerjasama IK-CEPA. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada kerjasama IK-CEPA pasca pembentukan WLFTM tersebut. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang bentuk kerjasama perekonomian antar Indonesia dan Korea Selatan yang juga berkaitan dimana IK-CEPA merupakan bentuk respon terhadap kegagalan dari WLFTM.

Penelitian keenam merupakan jurnal oleh Rebecca Pratiwi Indonesia Rompas yang berjudul **Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan, 2011 – 2016** yang ditulis pada tahun 2019¹⁷. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggunakan teori perdagangan internasional sebagai alat analisa datanya. Berdasarkan penggunaan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kerjasama – kerjasama perdagangan dan ekonomi yang dijalin oleh Indonesia dan Korea Selatan dan juga potensi – potensi yang dapat tercapai melalui kerjasama – kerjasama tersebut dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian kedua negara.

Pada penelitian ini penulis pertama menjelaskan tentang komoditas – komoditas ekspor dan impor yang menjadi bahan perdagangan penting bagi Indonesia dan Korea Selatan. Sebagai contoh komoditas ekspor Indonesia yang memiliki persentase demand tinggi

¹⁷ Rompas, R. I. (2019). Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan, 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1), 1906-1920.

oleh Korea Selatan adalah bahan dan barang kimia, tekstil, pangan atau makanan, rotan, dan kulit. Komoditas – komoditas tadi mengalami pelonjakan demand dari Korea Selatan sejak tahun 2016. Selain itu juga pada sektor impor teridentifikasi sebagai berikut kendaraan bermotor, logam dasar, alat elektronik, tekstil, dan karet.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang bentuk – bentuk kerjasama yang terjalin antar Indonesia dan Korea. Seperti perjanjian *Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation* yang didalamnya terdapat *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM) yang merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan perekonomian kedua negara pada tahun 2006.¹⁸ Akan tetapi WLTFM ini tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan diimpikan bahkan menyebabkan perdagangan kedua negara menjadi semakin menurun.

Dengan menurunnya aktivitas perdagangan tersebut maka kedua negara harus menemukan solusi yang dapat kembali meningkatkan proses perdagangan kedua negara yang sempat menurun tadi. Sehingga munculah proyek baru yang dinamakan Indonesia-Korea *Comprehensive Partnership Agreement* atau IK-CEPA dimana sebagai bentuk substitusi dari WLTFM tadi, IK-CEPA ini diharapkan dapat mengembalikan aktivitas perekonomian dari kedua negara dan bahkan juga untuk mengembangkannya lebih lanjut. Namun sayangnya, proses negosiasi dari IK-CEPA ini terhenti akibat tidak ditemukannya package deal oleh

¹⁸ Ibid.

kedua negara sehingga kedua negara memilih untuk menghentikan sementara proses negosiasi ini.

Selain itu juga penelitian ini memaparkan konsep baru akibat dari terhambatnya proses negosiasi dari IK-CEPA ini, dimana konsep tersebut memfokuskan kepada komitmen kedua negara terhadap bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mempercepat proses industrialisasi di Indonesia. Konsep ini kemudian diberikan nama *Special Strategic Partnership* yang diharapkan dapat mencapai target perdagangan sebanyak USD 30 Milyar yang akan tercapai kurang lebih hingga tahun 2022.¹⁹

Berdasarkan penelitian diatas perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dan juga batasan waktunya. Penelitian ini berfokus pada bentuk hubungan dagang yang dimiliki oleh Korea Selatan dengan Indonesia secara luas dan general yang juga membatasi waktunya sejak tahun 2011 hingga tahun 2016. Sedangkan penulis penelitian berfokus secara spesifik kepada kerjasama IK-CEPA dan juga spesifik kepada alasan dari Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA dan selain itu juga batasan waktu penelitian penulis memiliki jangka yang lebih panjang yaitu hingga tahun 2021.

Penelitian ketujuh merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Audrey Dylania Muchsya pada tahun 2020 yang berjudul **Kerjasama Korea Selatan-Indonesia dalam Hubungan *Special Strategic***

¹⁹ Ibid.

Partnership di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait dengan *special strategic partnership* yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Korea Selatan dalam periode waktu 2018 hingga 2019 atau lebih tepatnya 2 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan juga Teori Kepentingan Nasional, Negosiasi, dan Kerjasama sebagai landasan analisa datanya.

Penelitian ini diawali dengan pembahasan terkait dengan kondisi perekonomian dari Indonesia dan Korea Selatan pada masa 2018 – 2019. Penulis menjelaskan bahwa Sejarah perekonomian dari Korea Selatan ini diawali dengan kondisi yang buruk dan berada di level dasar. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor seperti kondisi mereka yang saat itu baru merdeka dari jajahan jepang, kemudian juga kondisi pasca perang saudara yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara, dan juga berbagai macam hal lainnya. Akan tetapi, Korea Selatan menjadi bangkit dan sekarang sudah menjadi salah satu negara dengan kekuatan perekonomian yang sangat kuat di dunia. Kemudian pembahasan bergeser kepada sejarah dari perekonomian Indonesia. Penulis menuturkan bahwa sejarah perekonomian dari Indonesia dan juga Korea Selatan memiliki similaritas yang sangat kentara. Indonesia sebagai negara berkembang yang sektor perekonomiannya mengalami perkembangan yang cukup pesat juga sempat mengalami *stint* yang

²⁰ Muchsya, A. D. (2020). *Kerjasama Korea Selatan-Indonesia dalam Hubungan Special Strategic Partnership di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019*. (thesis). FISIP: Program Studi Hubungan Internasional, Jakarta.

buruk pada sektor perekonomiannya di masa awal negara Indonesia merdeka. Hal ini mayoritasnya disebabkan oleh isu – isu peninggalan belanda yang tentunya menghambat perkembangan dari perekonomian Indonesia itu.

Penulis juga sedikit membahas tentang kerjasama bilateral dari Indonesia dan juga Korea Selatan. Penulis menjelaskan bahwa sebelum terjadi kerjasama pada tahun 2018-2019 ini, Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerjasama di bidang ekonomi juga, namun tidak komprehensif. Pada akhirnya dicetuskanlah *Strategic Partnership* yang dinilai lebih relevan dan juga komprehensif dibanding dengan perjanjian – perjanjian lainnya.²¹ Penelitian ini kemudian menjelaskan bahwa sejak terjalannya kerjasama ini, kedua negara menjadi lebih erat relasinya, terutama pada bidang ekonominya. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi perkembangan kedua negara, terutama di bidang ekonomi.

Hasil dari penelitian ini adalah tentunya kerjasama ini sebagai bentuk pemenuhan dari kepentingan nasional kedua negara yaitu untuk semakin meningkatkan kualitas masing – masing negara di sektor perekonomian²². Beberapa sektor yang sangat menonjol dari adanya kerjasama ini adalah sektor industri, perdagangan bilateral, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun kerjasama ini merupakan hal yang positif bagi kedua negara, tentunya masih terdapat hambatan –

²¹ Ibid.

²² Ibid.

hambatan yang mengganggu berjalannya kerjasama ini. Meskipun begitu kedua negara berniat untuk semakin meningkatkan intensitas kerjasama antara kedua negara tersebut agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kedua negara.

Keempat penelitian diatas bermanfaat bagi penulis untuk lebih memahami lebih lanjut tentang bentuk kerjasama yang dijalin oleh Korea Selatan dan Indonesia. Penelitian ini juga dapat membantu menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk kerjasama Indonesia dan Korea Selatan pra kerjasama IK-CEPA.

1.4.3 Analisis Politik Luar Negeri Korea Selatan Melalui Model Adaptif

James N. Rosenau

Penelitian kedelapan adalah sebuah skripsi oleh Imro'atul Mufidah pada tahun 2021 yang berjudul **Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* Dengan Jepang pada Tahun 2019.**²³ Pada penelitian ini menggunakan metode analisa data melalui keamanan nasional dan juga model adaptif politik luar negeri James N. Rosenau dan merupakan penelitian dengan metode kualitatif eksplanatif. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menentukan latar belakang dari Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari dari pakta *General Security of Military Information Agreement* dengan

²³ Mufidah, I. (2021). *Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen General Security of Military Information Agreement Dengan Jepang pada Tahun 2019* (thesis). FISIP: Program Studi Hubungan Internasional, Surabaya.

Jepang ketika pada awalnya mereka berniat untuk menarik diri dari pakta tersebut.

Penelitian ini dibuka dengan pembahasan terkait dengan urgensi dari Korea Selatan terkait dengan *General Security of Military Information Agreement* atau GSOMIA. Penulis menjelaskan bahwa meskipun dibumbui dengan masa lalu yang cukup kelam bagi Korea Selatan terhadap Jepang, terdapat beberapa faktor yang menjadikan kerjasama terkait dengan keamanan ini disetujui oleh Korea Selatan.

²⁴Faktor pertama adalah keberadaan dari 4 buah satelit Jepang yang telah memantau bagian utara dari semenanjung Korea. Kemudian Korea Selatan tertarik dengan teknologi anti kapal selam Jepang yang kelas dunia agar dapat mengantisipasi ancaman dari peluncuran rudal balistik Korea Utara yang berasal dari kapal selam. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari Amerika Serikat yang menganggap Jepang sebagai landasan dari kebijakan Asia, sehingga dengan adanya aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat menyebabkan mereka terdorong untuk peduli terhadap kerjasama ini. Hal ini ditambah dengan prioritas utama dari Korea Selatan untuk menjaga dan memberikan rasa aman dari ancaman keamanan yang diberikan oleh Korea Utara menjadi faktor utama bagi Korea Selatan untuk menandatangani kerjasama ini pada tahun 2016.

²⁴ Ibid.

Kemudian penulis membahas terkait dengan alasan mengapa Korea Selatan berniat untuk menarik diri dari pakta GSOIMA ini. Penelitian ini menjelaskan bahwa perang dagang yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang menjadi faktor penting dari rasionalitas Korea Selatan untuk menarik diri dari pakta GSOIMA ini.²⁵ Awal mulanya adalah gugatan dari 4 warga Korea Selatan yang menggugat Jepang atas masa pekerjaan mereka selama masa pendudukan Jepang dulu. Gugatan ini bahkan sampai ke mahkamah agung Korea Selatan dan terus berkembang hingga menjadi isu antara kedua negara. Hingga pada akhirnya Jepang memutuskan untuk membatasi ekspor 3 bahan kimia yang penting dalam pembuatan chip komputer, panel layar, dan bermacam – macam alat elektronik lainnya yang menjadi salah satu ekspor utama dari Korea Selatan. Melihat hal tersebut, Korea Selatan kemudian menghapus Jepang dari mitra dagangnya dan memberikan keluhan kepada *World Trade Organization* atau WTO terkait dengan penahanan ekspor dari Jepang ini. Pada akhirnya Korea Selatan semakin berani dan menarik diri dari pakta GSOIMA.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama dari Korea Selatan untuk tidak menarik diri dari pakta GSOIMA ini didasari oleh beberapa faktor seperti pengaruh dari Presiden Moon Jae-In yang menilai bahwa rasional untuk pakta ini masih dilakukan karena tentunya akan berdampak pada aktivitas diplomatik lainnya. Kemudian juga

²⁵ Ibid.

terdapat tekanan dari Amerika Serikat untuk tidak memutuskan kerjasama pakta GSOIMA ini melalui kunjungan Menteri Pertahanan AS ke Korea Selatan untuk membahas terkait masalah ini. Korea Selatan juga sadar bahwa jika mereka mundur dari pakta GSOIMA ini maka akan membuka jalur bagi Korea Utara dan juga China untuk semakin mempererat relasi dan menghancurkan aliansi dari AS-Korea Selatan-Jepang yang telah terbangun sejak lama. Selain itu, baik Jepang maupun Korea Selatan juga masih berada ancaman rudal nuklir dari Korea Utara sehingga kedua negara menyadari ancaman itu dan hal – hal inilah yang menjadi rasionalitas dari Korea Selatan untuk tetap melanjutkan kerjasamanya dengan Jepang terkait dengan pakta GSIOMA ini.

Penelitian diatas dapat membantu penulis untuk kemudian menjabarkan kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh Korea Selatan melalui model adaptif politik luar negeri James Rosenau, sehingga dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan gambaran dalam penelitian penulis sendiri untuk menjelaskan rasionalitas Korea Selatan untuk melanjutkan negosiasi IK-CEPA dengan Indonesia ini.

Tabel 1.1 Tabel Literature Review

No.	Nama Peneliti & Judul	Jenis Penelitian & Alat Analisa	Hasil
1.	<p>“Pendekatan Behavioralisme dan Kendala Perundingan <i>Indonesia –Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)</i>”</p> <p>Oleh: Achmad Ismail dan Darynaufal Mulyaman</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa : Behavioralisme</p>	<p>Indonesia bersifat defensif selama proses negosiasi. Kedua negara tidak menemukan titik terang, terutama pada garansi investasi dan sektor pertanian, sehingga negosiasi terhenti. Meskipun belum terbilang gagal total, dampak dari terhentinya negosiasi tersebut dapat dirasakan pada menurunnya kegiatan perdagangan dari kedua negara yang tentunya selaras dengan terhentinya negosiasi tadi.</p>
2.	<p>“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terhentinya</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa :</p>	<p>Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhentinya perundingan IK-CEPA. Faktor pertama</p>

<p>Perundingan Indonesia-Korea <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IK- CEPA)”</p>	<p>Kepentingan Nasional & Paradigma Realisme</p>	<p>adalah faktor perekonomian dalam bidang investasi dan perdagangan yang dimana kedua negara tidak menemukan titik terang penentuan pos tarif pada sektor – sektor yang dinilai penting. Kemudian juga penolakan Korea Selatan terhadap klausul investasi dari Indonesia juga menjadi salah satu faktornya. Dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan nilai ekspor yang menyebabkan Indonesia menerima nilai impor yang lebih tinggi dibanding dengan ekspornya, yang tentunya hal tersebut tidak selaras dengan kepentingan Indonesia yang ingin merubah perekonomiannya menjadi</p>
<p>Oleh: Ayu Caesar Tiara</p>		

			<i>export-driven.</i>
3.	<p>“Kerjasama Republik Indonesia dengan Republik Korea: Penyelesaian Perundingan <i>Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IK-CEPA) Tahun 2011-2014”</p> <p>Oleh: Vindy Fellisia</p>	<p>Tipe Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa : Kerjasama Internasional & Negosiasi</p>	<p>Aktivitas perdagangan bebas di Asia meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi Asia. Di Asia Timur terutama Korea Selatan menyadari betapa pentingnya regionalisasi dan mulai meningkatkan aktivitas kerjasama perekonomiannya. Banyak negara yang berhasil menjadi partner kerjasama dari Korea Selatan dan salah satunya Indonesia melalui perundingan IK-CEPA nya. IK-CEPA sendiri masih berada dalam tahap negosiasi dan tawar menawar yang masih belum</p>

			<p>menemukan titik terang terutama pada sektor investasi dan perdagangan. Jika kesepakatan telah tercapai, maka kerjasama ini akan bersifat sebagai <i>upgrade</i> dari kerjasama AKFTA yang tentunya akan memberikan keuntungan yang melebihi keuntungan yang didapat melalui kerjasama AKFTA.</p>
4.	<p>“Analysis of Trade in Goods between Indonesia and South Korea on Cooperation Forum IKCEPA”</p> <p>Oleh: Ragimun</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: Analisa Keseimbangan Sederhana</p>	<p>Banyak barang yang dapat dijadikan dan diusulkan selama proses negosiasi antara Indonesia dan Korea Selatan mengenai kerjasama IK-CEPA (bubuk susu, & kura – kura air tawar sebagai contoh). Tentunya kerjasama</p>

	Abdullah		ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi bahkan menghilangkan <i>tariff barrier</i> yang ada agar keuntungan maksimal dapat dicapai.
5.	<p>“Penurunan Perdagangan Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Kerjasama <i>Working Level Taskforce Meeting</i> (WLTFM)”</p> <p>Oleh: Belita Ayu Silviana Wibisono</p>	<p>Jenis Penelitian: Eksplanatif</p> <p>Alat Analisa : Kerjasama & Regim Internasional</p>	<p>Hasil kelompok kerja WLTFM terutama kelompok bidang investasi dan perdagangan yang kurang memuaskan dipercaya sebagai hasil dari Korea Selatan yang bersifat <i>self-centered & egoistic</i> dimana Korea Selatan yang mempromosikan energi alternatif sedangkan mayoritas komoditi impor dari Indonesia yang berupa migas yang jika promosi tersebut berhasil maka tidak akan memerlukan kegiatan impor lagi dari Indonesia dan juga nilai ekspor yang</p>

			<p>tinggi membebani pengekspor dalam melakukan kegiatan pengeksporan. Hal – hal tersebutlah yang menyebabkan kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Korea menjadi menurut setelah WLTFM. Kemudian muncullah konsep kerjasama IK-CEPA yang dinilai akan menjadi jalan keluar bagi penurunan aktivitas perdagangan kedua negara dan akan meningkatkan kegiatan perdagangan tersebut sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih daripada tahun – tahun sebelumnya.</p>
6.	“Hubungan Dagang Internasional	Jenis Penelitian: Deskriptif	Selama 2011 – 2016 Indonesia dan Korea Selatan

<p>Indonesia dan Korea Selatan, 2011 – 2016”</p> <p>Oleh: Rebecca Pratiwi Indonesia Rompas</p>	<p>Alat Analisa: Perdagangan Internasional</p>	<p>mengalami dan menjalin berbagai macam bentuk kerjasama perekonomian. Mulai dari Working Level Task Force Meeting atau WLTFM, kemudian ada juga negosiasi IK-CEPA yang proses negosiasinya sempat terhenti, dan juga terdapat konsep Special Strategic Partnership yang direncanakan untuk dapat tercapai pada tahun 2022. Banyaknya bentuk kerjasama ini menunjukkan bahwa Korea Selatan menilai dan mempertimbangkan Indonesia memiliki potensi dalam upaya meningkatkan sektor perekonomiannya, dan tentunya Indonesia juga merasa demikian dimana terdapat keuntungan dalam</p>
--	--	---

			menjalinkan kerjasama dengan Korea Selatan. Sehingga sangat wajar jika dalam masa mendatang kedua negara akan semakin erat dan aktif dalam menjalin hubungan kerjasama perekonomian dalam upaya untuk mengembangkan sektor perekonomiannya.
7.	Kerjasama Korea Selatan-Indonesia dalam Hubungan <i>Special Strategic Partnership</i> di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019. Oleh: Audrey Dylania Muchsya	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat Analisa: Kepentingan Nasional, Negosiasi, dan Kerjasama	Sejarah perkembangan sektor Korea Selatan dan juga Indonesia memiliki similaritas yang cukup signifikan. Kedua negara mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat meskipun memiliki beberapa masa – masa kelam yang sempat menghambat perkembangan dari sektor perekonomian kedua negara. Indonesia dan Korea Selatan

		<p>juga telah memiliki dan membangun hubungan bilateral yang cukup baik sejak lama, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan bagi kedua negara untuk menjalin kerjasama <i>Special Strategic Partnership</i> ini. Melalui kerjasama ini kedua negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya yaitu untuk sama – sama membangun dan mengembangkan sektor perekonomian kedua negara. Sektor yang menonjol dalam kerjasama ini adalah sektor industri, perdagangan bilateral, dan juga pembangunan infrastruktur dimana ketiga sektor ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan.</p>
--	--	---

			Meskipun terdapat beberapa hambatan, kedua negara bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik yang telah terbangun antara Indonesia dan Korea Selatan.
8.	Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelejen <i>General Security of Military Information Agreement</i> Dengan Jepang pada Tahun 2019 Oleh: Imro'atul Mufidah	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat Analisa: Keamanan Nasional & Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri James Rosenau	Pakta <i>General Security of Information Agreement</i> atau GSOIMA merupakan sebuah kerjasama pada bidang keamanan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan juga Jepang. Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama pada bidang keamanan nasional bagi kedua negara untuk mencegah kemungkinan agresi dari Korea Utara. Akan tetapi, Korea Selatan sempat berniat untuk mengundurkan diri dari pakta ini diakibatkan

		<p>oleh beberapa faktor seperti perang dagang dan sedikit menyenggol sejarah yang dimiliki oleh kedua negara. Mulai dari penggugatan warga Korsel dan juga pembatasan ekspor dari Jepang hingga penghapusan Jepang sebagai mitra perdagangan Korsel. Akhirnya Korea Selatan memutuskan untuk menghentikan kerjasama GSOIMA ini. Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menjadikan Korea Selatan batal untuk keluar dari kerjasama ini seperti desakan AS terkait kerjasama ini, rasionalitas dari Moon Jae-In sebagai Presiden Korsel, dan kesadaran bahwa akan terjadi</p>
--	--	--

			<p>kerugian yang lebih besar dibanding dengan keuntungan yang didapatkan jika berhenti dari kerjasama ini. Atas dasar faktor – faktor tersebut, akhirnya Korea Selatan memilih untuk melanjutkan kerjasama GSOIMA bersama dengan Jepang ini.</p>
--	--	--	--

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Adaptive Model of Foreign Policy James N. Rosenau

Analisa terhadap kebijakan luar negeri suatu negara dapat ditelaah melalui berbagai sudut pandang. Para ahli kemudian mencetuskan beberapa model yang dapat menjelaskan dan menjustifikasi pengambilan keputusan dari kebijakan luar negeri suatu negara tersebut. Salah satu dari model analisa tersebut adalah *Adaptive Model of Foreign Policy* yang dikemukakan oleh James N. Rosenau. Rosenau berpendapat bahwa pengambilan keputusan terhadap pencetusan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan bentuk respon dan adaptasi dari negara tersebut terhadap pengaruh dan perubahan yang terjadi baik itu dari faktor internal atau dari dalam negara maupun secara

eksternal atau dari dunia internasional dan pengaruh negara – negara lain.²⁶

Adaptive Model of Foreign Policy ini berusaha untuk memilah beberapa hal yang dapat menjadi jawaban dari politik luar negeri suatu negara. Hal ini dilakukan dengan menelaah faktor – faktor seperti letak dan posisi geografis dari negara tersebut, kemudian juga kapabilitas dari sumber daya manusia dan juga alam yang dimiliki oleh negara tersebut dan berbagai macam hal lainnya yang sekiranya dapat menjadi pengaruh suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri. Oleh karenanya, ketika dorongan dan tekanan dari faktor – faktor internal dan juga eksternal menjadi tidak stabil menjadikan pemerintah yang berperan sebagai aktor pengambil keputusan sebuah negara untuk melakukan aktivitas politik luar negeri melalui pencetusan kebijakan luar negeri.²⁷ Hal ini dilakukan agar tekanan yang ada tersebut dapat dikendalikan dan menjadi seimbang dan juga agar dapat meminimalisir kerugian yang diterima oleh negara sekaligus memaksimalkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan untuk negara tersebut.

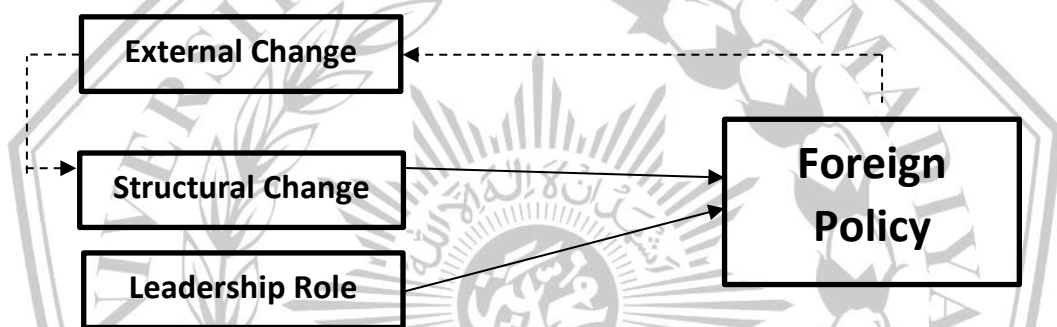
Adaptive Model of Foreign Policy ini juga menjelaskan bahwa sebuah negara memutuskan suatu kebijakan luar negeri berdasarkan faktor internal dan juga eksternal yang terjadi di negara tersebut. Model ini berfokus kepada suatu situasi dan kondisi dari sebuah negara yang

²⁶ Agung, B. P. A., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar Ilmu hubungan internasional*. PT Remaja Rosdakarya hal. 57

²⁷ Ibid.

pada akhirnya menciptakan suatu situasi yang memunculkan relasi antara sebab dan akibat dimana faktor internal dan juga eksternal menjadi sebab dan akibatnya adalah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Hubungan sebab-akibat yang diakibatkan oleh suatu situasi dan kondisi yang menjadi pemicu dan faktor utama bagi suatu negara dapat dijelaskan secara singkat melalui gambar berikut :

Gambar 1.1 Adaptive Model of Foreign Policy



Sumber: Agung, B. P. A., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar Ilmu hubungan internasional*. PT Remaja Rosdakarya

Melalui model diatas dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara merupakan dampak dari pergeseran dan perubahan pada faktor eksternal dan juga perubahan struktural atau perubahan internal. Dengan kata lain, perumusan dari teori ini termasuk pengaruh dari dunia internasional atau faktor external, dorongan dari kepentingan internal dan juga dari *leadership* atau pemimpin dari negara tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara.

Melalui model diatas dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara merupakan dampak dari pergeseran dan perubahan pada faktor eksternal dan juga perubahan struktural atau perubahan internal. Dengan kata lain, perumusan dari teori ini termasuk pengaruh dari dunia internasional atau faktor external, dorongan dari perubahan internal dan juga dari *leadership role* atau pemimpin dari negara tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara.²⁸

James Rosenau kemudian mendefinisikan *Structural Change* dan juga *External Change* sebagai berikut dimana *Structural Change* merupakan segala hal dari dalam negara tersebut yang berpengaruh kepada pengambilan keputusan dari kebijakan luar negeri. Perubahan – perubahan tersebut terdapat 2 sumber dimana yang pertama bersumber dari masyarakat dan yang kedua bersumber dari pemerintahan negara tersebut. Perubahan yang berasal dari masyarakat dapat terbentuk dari beberapa faktor seperti letak geografis, pembangunan, *size*, opini publik, teknologi, budaya dan sejarah, dan juga struktur sosial dari masyarakat. Sedangkan perubahan pada pemerintahan mencakup struktur dari pemerintahan dan juga akuntabilitas politik negara tersebut.²⁹

Letak geografis menjadi faktor penting karena meliputi struktur tanah, letak, dan keadaan iklim suatu negara yang mempengaruhi negara tersebut dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan luar

²⁸ Rosenau, J. N., & Thompson, K. W. (1976). *World politics: An introduction*. Free Press.

²⁹ Rosenau, J. N. (1981). *The study of political adaptation*. Pinter.

negerinya. Faktor pembangunan berfokus kepada tingkat pembangunan ekonomi dimana dengan semakin tingginya pembangunan ekonomi negara tersebut maka akan semakin tinggi juga jumlah produk nasional bruto atau *Gross National Product* (GNP) nya. Dengan tingginya GNP yang didapatkan maka akan semakin mudah suatu negara untuk menggunakannya pada urusan – urusan eksternal dan semakin mudah juga pengaplikasian kebijakan luar negeri mereka tersebut. Faktor *Size* berfokus kepada kualitas dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Penilaian kualitas dari sumber daya alam terlihat pada kekayaan alam yang ada dan luas region dari negara tersebut. Sedangkan kualitas sumber daya manusia suatu negara terlihat pada angka populasi masyarakat dan juga kemampuan dari masyarakat negara tersebut.³⁰

Faktor opini publik berfokus kepada suara dan respon dari masyarakat terhadap perubahan di ruang lingkup eksternal maupun juga internal. Namun pengaruh dari respon masyarakat ini kembali lagi menyesuaikan dengan sistem politik dari negara tersebut. Faktor teknologi berfokus kepada perkembangan teknologi dari negara tersebut dimana dengan perkembangan teknologi yang terkemuka maka akan berdampak kepada sektor militer dan juga ekonomi dari negara tersebut. Semakin majunya teknologi dari suatu negara maka akan meminimalisir kesulitan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Faktor budaya dan sejarah berfokus kepada sejarah yang

³⁰ Ibid.

terjadi dan juga norma adat yang telah berdiri diantara masyarakat tersebut dimana kedua hal ini menyatukan pola pikir dari masyarakat negara tersebut. Suatu negara akan semakin mudah untuk membuat kebijakan luar negeri ketika semakin banyak masyarakatnya bersifat homogen atau berada di bawah satu pemahaman yang dibawa oleh budaya dan sejarah negara tersebut. Faktor terakhir adalah faktor struktur sosial yang berfokus kepada kondisi sosial dari masyarakat negara tersebut. Kelas sosial dan status yang berbeda dapat memunculkan kondisi konflik antara masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan dari pembuat kebijakan luar negeri dari negara tersebut.³¹

Kemudian perubahan yang bersumber dari pemerintah seperti perubahan struktur pemerintahan juga menjadi faktor berpengaruh dalam pengambilan keputusan suatu negara. Struktur pemerintahan akan menentukan pengaruh dan kekuasaan dari pemimpin dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kemudian faktor lainnya adalah akuntabilitas politik dari pemerintah yang berfokus kepada tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakatnya melalui aktivitas eksternal dengan negara lain, pengadaan pemilihan umum, adanya pengawasan terhadap legislatif pemerintahan, persaingan antar partai politik, tingkat korupsi yang rendah dari negara tersebut dan tidak juga

³¹ Ibid.

segala kegiatan pemerintah untuk aktivitas luar negeri.³² Respon terhadap masyarakat yang menuntut perubahan akan dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas politik ini.

Sedangkan *External Changes* merupakan faktor yang berasal dari eksternal negara tersebut yang menyebabkan negara harus beradaptasi dan mengeluarkan kebijakan luar negeri agar dapat merespon perubahan tersebut. Perubahan – perubahan yang berasal dari ranah eksternal ini disebut Rosenau sebagai *Systemic Sources* dan dapat dilihat melalui 3 poin yaitu *great power structure*, *situational factor*, dan juga pola – pola aliansi dari negara bangsa.³³ *Great power structure* berfokus kepada perubahan struktur atau hubungan antara negara – negara besar atau *great power nations* yang memiliki pengaruh besar pada ruang lingkup internasional. Perubahan yang terjadi pada hubungan antara *great power nations* ini akan mempengaruhi negara – negara yang memiliki relasi dengan negara – negara tersebut sehingga mengharuskan suatu negara untuk beradaptasi dan mengeluarkan kebijakan luar negeri baru untuk meng *counter* perubahan tersebut.³⁴ *Situational factor* berfokus kepada suatu situasi eksternal yang kemudian mendorong suatu negara untuk beradaptasi terhadap situasi tersebut (situasional). Ancaman dan krisis yang mengancam suatu negara dan isu internasional yang sedang terjadi dapat menjadi bentuk dari *situational factor* ini. Kemudian faktor aliansi

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Agung, B. P. A., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar Ilmu hubungan internasional*. PT Remaja Rosdakarya

yang berfokus kepada kerjasama yang dilakukan oleh negara – negara untuk merespon peristiwa – peristiwa yang terjadi dengan tujuan politik. Dengan adanya aliansi ini, negara – negara akan sering menciptakan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya sehingga muncul sebuah komitmen yang menjadi faktor penting dalam aliansi tersebut.³⁵

Kemudian Rosenau menjelaskan juga terkait *leadership role* dimana jika terjadi sebuah perubahan dari pemimpin negara maka keberadaan seorang pemimpin menjadi aktor penting dalam sebuah pengambilan keputusan pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan adanya penggantian aktor pemimpin ini maka akan terdapat juga penggantian tindakan dan pengambilan keputusan di era pemimpin baru setelah masa pemimpin sebelumnya sehingga pada teori ini proses analisa lebih berfokus kepada aktornya atau individu. Membahas pemimpin negara, maka juga harus melihat poin – poin terkait dengan pemimpin tersebut seperti latar belakang dari aktor pemimpin, tujuan dari pemimpin tersebut, gaya kepemimpinannya, dan kekuatan dan kelemahan aktor pemimpin dalam pengambilan keputusan. Meskipun sebagai aktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan suatu negara, seorang pemimpin tentunya harus juga mempertimbangkan faktor – faktor lain seperti kondisi masyarakat,

³⁵ Ibid.

pemerintahan dan juga bentuk sistem politik di negara yang ia pimpin, tidak hanya melakukan hak semena – mena.³⁶

Adaptive Model of Foreign Policy oleh James Rosenau ini juga mengemukakan beberapa pola adaptasi yang dapat dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk respon dari pengaruh faktor internal dan juga eksternal terhadap kebijakan luar negerinya. Pola adaptasi tersebut antara lain adalah *Preservative Adaptation* yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan pada kebijakan luar negeri suatu negara yang merupakan hasil dari kondisi sebab dan akibat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kemudian ada *Aquiescent Adaptation* yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan pada kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari kondisi sebab dan akibat yang dipengaruhi oleh faktor – faktor eksternal saja. Selanjutnya adalah *Intransigent Adaptation* dimana suatu pengambilan keputusan dari kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari kondisi sebab dan akibat yang dipengaruhi oleh faktor – faktor internal. Dan yang terakhir adalah *Promotive Adaptation* yaitu ketika suatu negara tidak mengambil keputusan atau tidak mengeluarkan kebijakan apapun sebagai bentuk respon dari negara tersebut terhadap dorongan dari berbagai faktor baik itu internal maupun juga external.³⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model adaptif oleh Rosenau untuk menjelaskan rasionalitas dari Korea Selatan dalam

³⁶ Rosenau, J. N., & Thompson, K. W. (1976). *World politics: An introduction*. Free Press.

³⁷ Agung, B. P. A., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar Ilmu hubungan internasional*. PT Remaja Rosdakarya

pemberlanjutan proses negosiasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) dengan menggunakan sudut pandang *Preservative Adaptation* dimana *Structural Change* yang mempengaruhi Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi dengan Indonesia dapat ditelaah melalui variabel akuntabilitas politik dimana perubahan yang terjadi berujung kepada pembentukan kebijakan luar negeri baru yaitu Kebijakan *New Southern Policy* yang berfokus kepada penyebaran aktivitas perekonomian ke region selatan Korea yaitu termasuk ASEAN yang salah satu negara diantaranya adalah Indonesia. Kemudian *External Change* yang mempengaruhi dapat ditelaah melalui variabel *situational factor* yaitu adanya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China yang secara tidak langsung memperlambat dan menurunkan sektor perekonomian Korea Selatan pada masa itu. Sedangkan pada faktor *leadership role* dapat ditelaah melihat dari naiknya Moon Jae In sebagai presiden dari Korea Selatan yang juga berkesinambungan dengan faktor *Structural Change*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Dalam penelitian eksplanatif penulis berusaha untuk menjelaskan relasi antar dua variabel yang saling mempengaruhi. Kemudian kedua variabel tersebut akan menciptakan suatu hipotesa yang akan diuji oleh penulis kebenarannya pada penelitian ini. Dengan menggunakan tipe penelitian

ini penulis akan berusaha untuk menjelaskan rasionalitas dari diberlanjutkannya proses negosiasi IK-CEPA ini.

1.6.2 Metode Analisa

Penelitian ini menggunakan metode penelitian data kualitatif. Metode kualitatif sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah metode dimana proses analisa data yang dilakukan untuk mencari tahu pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fenomena, dan realita yang kemudian dijelaskan melalui kata – kata.³⁸ Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data – data kualitatif yang dapat membantu dan berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan referensi dan dukungan terhadap konsep yang digunakan oleh penulis untuk berupaya memaparkan rasionalitas terhadap pemberlanjutan proses negosiasi IK-CEPA ini.

1.6.3 Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa Korelasionis. Penggunaan tingkat analisa ini karena pada penelitian ini unit eksplanasinya atau variabel independennya sama dengan unit analisa atau variabel dependennya.³⁹

1.6.4 Variabel Penelitian

Unit eksplanasi (variabel independen) yang terdapat pada penelitian ini adalah Rasionalitas dari Korea Selatan dalam mengambil

³⁸ Semiawan, Conny R. “Pengertian, Tujuan, Dan Latar Belakang Penelitian.” Essay. In *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–10. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

³⁹ Mas'oed, M. (1990). Tingkat Analisa. In *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (pp. 42-43). Jakarta: LP3ES.

keputusan (Negara-Bangsa) dan unit analisisnya (variabel dependen) sebagai kebijakan Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi kerjasama IK-CEPA (Negara-Bangsa).

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.5.1 Batasan Materi

Agar penelitian ini tidak melebar terlalu keluar dari topik pembahasannya, peneliti membatasi penelitian ini dengan menjelaskan tentang IK-CEPA dan rasionalitas Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi kerjasama IK-CEPA tersebut.

1.6.5.2 Batasan Waktu

Awal mula proses negosiasi dari kerjasama IK-CEPA terjadi pada tahun 2011 dan terus berlanjut hingga sempat terhenti pada tahun 2014. Negosiasi dari perjanjian ini diumumkan kembali dilakukan pada tahun 2019 dan akhirnya berhasil ditandatangani pada pertengahan Desember tahun 2020. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menentukan batasan waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2014 hingga 2019.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu data – data terkait dengan penelitian tentang kerjasama IK-CEPA yang didapat melalui literatur – literatur baik

berupa buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, ataupun berita yang bersifat fisik maupun non-fisik dimana data yang diperoleh oleh penulis kemudian akan disesuaikan dengan sistematika penulisan.

1.7 Hipotesa

Berdasarkan model adaptif James Rosenau yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menentukan hipotesa melalui faktor *external change*, *internal change* dan juga *leadership role* yang mempengaruhi rasionalitas Korea Selatan dalam pemberlanjutan negosiasi Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau IK-CEPA. Korea Selatan sebagai aktor pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri sempat memilih untuk memberhentikan proses negosiasi IK-CEPA pada tahun 2014 dikarenakan oleh tidak terpenuhinya kepentingan nasional dari Korea Selatan sendiri dan proses negosiasi IK-CEPA ini tidak menunjukkan potensi untuk berlanjut hingga tahun 2019 ketika Korea Selatan mengambil keputusan untuk melanjutkan proses negosiasi ini. Faktor *external change* yang mempengaruhi rasionalitas Korea Selatan adalah terjadinya peristiwa perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang dapat dilihat melalui variabel *situational factor*. Hal ini secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dari perekonomian Korea Selatan yang tentunya merupakan hal yang negatif bagi Korea Selatan itu sendiri. Oleh karena hal ini, Korea Selatan memilih untuk melanjutkan proses negosiasi ini agar dapat kembali menggerakkan roda perekonomian negaranya Sedangkan faktor *structural changes* yang dimaksud dapat dianalisa melalui variabel akuntabilitas pemerintah dimana perubahan – perubahan yang terjadi berujung kepada kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan yaitu *New Southern Policy* yang bertujuan untuk mengembangkan aktivitas ekonomi ke region selatan terutama ASEAN+1. Melalui kebijakan ini, Korea Selatan menilai bahwa memang terdapat potensi dari adanya kerjasama IK-CEPA ini sehingga dapat memaksimalkan kebijakan tersebut sehingga melalui *New Southern Policy* ini Indonesia menjadi target utama bagi Korea Selatan dalam mengembangkan perekonomiannya. Ditambah dengan faktor *leadership role* dari Presiden Moon Jae In yang baru saja diangkat menjadi Presiden pada saat itu sebagai aktor utama pencetus kebijakan *New Southern Policy*. Pada akhirnya proses negosiasi kerjasama ini kembali dilanjutkan pada tahun 2019 dan secara resmi ditandatangani pada tahun 2020 oleh Menteri Perdagangan Indonesia Agus Supramanto dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Sun Yun-mo. Dengan adanya kerjasama IK-CEPA ini Korea Selatan dapat menerima pemotongan biaya tarif barang ke Indonesia dan juga menjadi prioritas dalam sektor investasinya ke Indonesia. Selain itu kerjasama IK-CEPA ini dapat merambat kepada sektor – sektor lain selain perekonomian saja seperti pariwisata, *soft-diplomacy* dan lain – lain yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi Korea Selatan itu sendiri. Kepemimpinan dari Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae-In juga berpengaruh dimana pasca pergantian pemerintahan, Korea Selatan mulai *reconsider* terkait dengan kerjasama IK-CEPA ini, ditambah dengan Moon Jae-in yang mengeluarkan kebijakan *New Southern Policy* menjadikan rekonsiderasi dari Korea Selatan ini menjadi sangat nyata, melihat hubungan yang dimiliki oleh Indonesia dan Korea Selatan. Melalui faktor - faktor inilah yang menjadi

pendorong rasionalitas dari Korea Selatan untuk melanjutkan negosiasi kerjasama IK-CEPA dengan Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami skripsi ini lebih mudah, penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tabel Sistematika Penulisan

Judul	Pembahasan
BAB 1 : Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.4.1 Faktor Pembentuk IK-CEPA 1.4.2 Analisis Kerjasama Perekonomian Indonesia-Korea Selatan 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Adaptif Model of Foreign Policy James N. Rosenau 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian

	<p>1.6.2 Metode Analisa Data</p> <p>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.4.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.4.2 Batasan Materi</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II</p> <p>Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement (IK-CEPA)</p>	<p>2.1 Sejarah Hubungan Korea Selatan Indonesia dan Perkembangan dari Korea Selatan</p> <p>2.1.1 Dampak dari “<i>Miracle on Han River</i>” Pada Korea Selatan</p> <p>Sejarah Hubungan Kerjasama Korea Selatan dan Indonesia</p> <p>2.2 Kerjasama IK-CEPA</p> <p>2.2.1 Sejarah pembentukan IK-CEPA</p> <p>2.2.2 Pemberhentian Negosiasi Kerjasama IK-CEPA</p> <p>2.3 Kondisi Perekonomian Korea Selatan Pasca Pemberhentian Negosiasi IK-CEPA</p> <p>2.4 Kebijakan <i>New Southern Policy</i></p>

	<i>dibawah Pemerintahan Moon Jae In</i>
BAB III Rasionalitas Pemberlanjutan Negosiasi Kerjasama IK-CEPA	<p>4.1 <i>External Change</i> yang mempengaruhi Korea Selatan dalam pemberlanjutan negosiasi IK-CEPA : Perang Dagang Amerika Serikat dan China.</p> <p>4.2 <i>Internal Change</i> yang mempengaruhi Korea Selatan dalam pemberlanjutan negosiasi IK-CEPA : Reformasi Perekonomian Melalui <i>New Southern Policy</i> .</p> <p>4.3 Faktor Leadership Role yang yang mempengaruhi Korea Selatan dalam pemberlanjutan negosiasi IK-CEPA: Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan</p>
BAB IV Penutup	<p>5.1 Keimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>
Daftar Pustaka	